



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

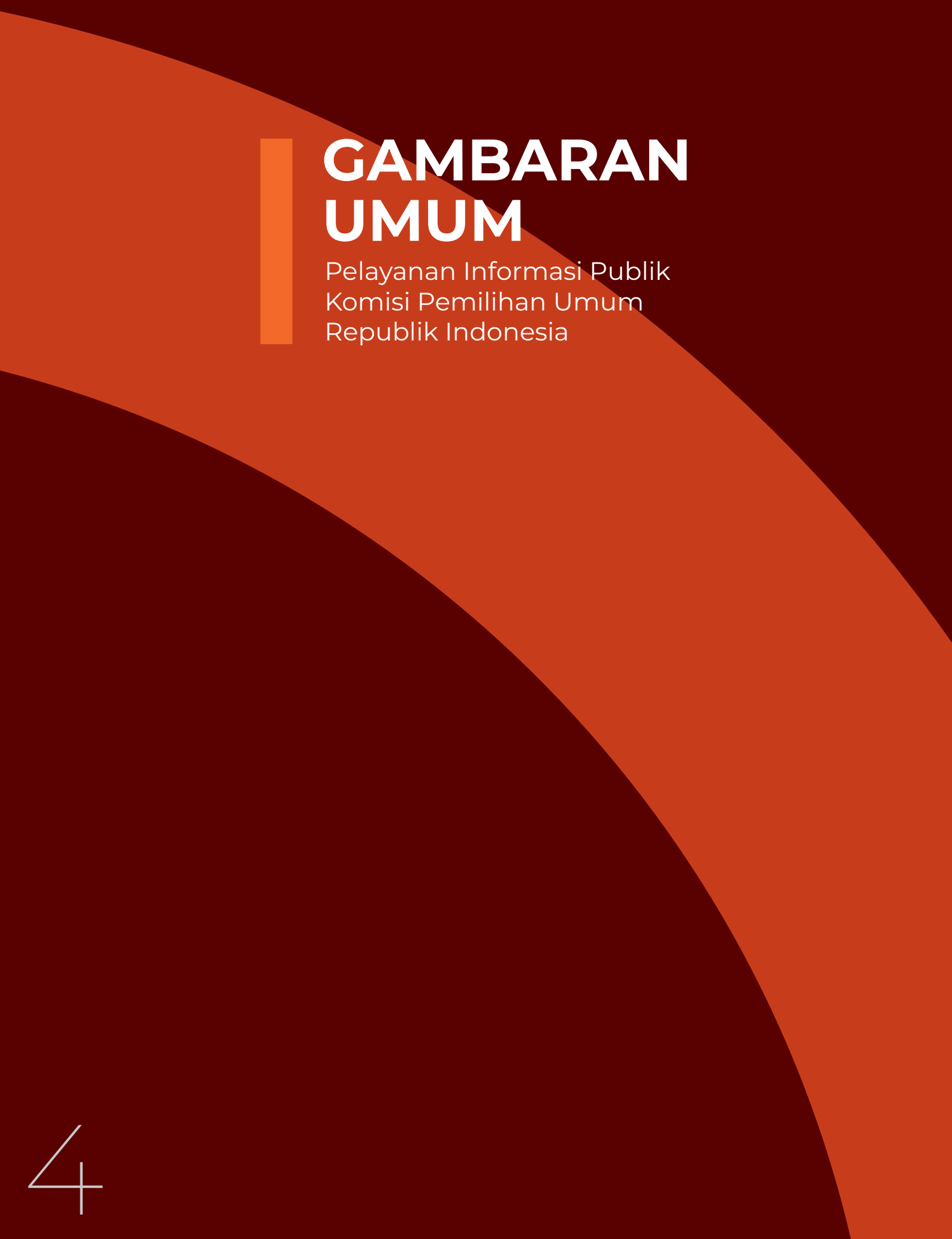
LAPORAN _____
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022



DAFTAR ISI

GAMBARAN UMUM	4
SARANA DAN PRASARANA	6
ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	8
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK	10
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	18
INOVASI DAN KOLABORASI	20
KENDALA	32
RENCANA TINDAK LANJUT	34

A large, stylized orange curved shape that sweeps across the upper half of the page, starting from the left edge and curving towards the bottom right.

GAMBARAN UMUM

Pelayanan Informasi Publik
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2022 menjadi komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kelembagaan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU secara kelembagaan.

Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembenahan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal

dilakukan, terus diupayakan. Aplikasi Android PPID Komisi Pemilihan Umum dan Website ppid.kpu.go.id yang memfasilitasi pelayanan informasi secara online telah aktif digunakan oleh pemohon informasi dari seluruh Indonesia.

Tugas KPU RI dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik nyatanya tidak hanya seputar pelaksanaan dalam “rumah” sendiri. Tugas berat untuk melakukan “ketuk tular” paham keterbukaan informasi berikut implementasinya kepada 34 KPU Provinsi/ KIP Aceh dan 514 KPU/ KIP Kabupaten/Kota menjadi amanah besar bagi KPU RI.

Serangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak Tahun 2015 telah mulai dirintis dan membuahkan hasil yang cukup positif.

Penghargaan keterbukaan informasi yang diraih oleh PPID KPU RI dan beberapa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi apresiasi yang membanggakan bagi seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia sekaligus sebagai pemacu semangat untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.



SARANA & PRASARANA

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

LAYANAN LANGSUNG



Desk Pelayanan Informasi di lantai 1
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.

Waktu operasional
Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)
dan Jumat (09.00 – 15.30).



SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.



TELEPON

(021) 31937223 ext (237) dan
(021) 31902573.



EMAIL

ppid@kpu.go.id



WEBSITE

ppid.kpu.go.id



APLIKASI ANDROID GOOGLEPLAYSTORE

PPID Komisi Pemilihan Umum



CHAT VIA WHATSAPP

+62 812-9411-2929

A large, stylized orange curved shape that sweeps across the upper half of the page, framing the title.

ANGGARAN & SUMBER DAYA MANUSIA

ANGGARAN

Kegiatan Pembentukan dan Penguatan PPID melalui program rakor evaluasi PPID di Lingkungan KPU dan Bimtek pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat kegiatan Pembentukan PPID Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Total anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 447.433.000,-

SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU RI sebagaimana diatur melalui Keputusan KPU No. 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua dan Anggota KPU RI
2	Tim Pertimbangan	1. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih 2. Sekretaris Jenderal 3. Deputi Bidang Dukungan Teknis 4. Deputi Bidang Administrasi 5. Inspektur Utama
3	Atasan PPID	Sekretaris Jenderal KPU RI
4	PPID	Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5	Tim Penghubung	Pejabat yang ditetapkan pada masing – masing biro/inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
6	Desk Pelayanan	Kepala Bagian pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

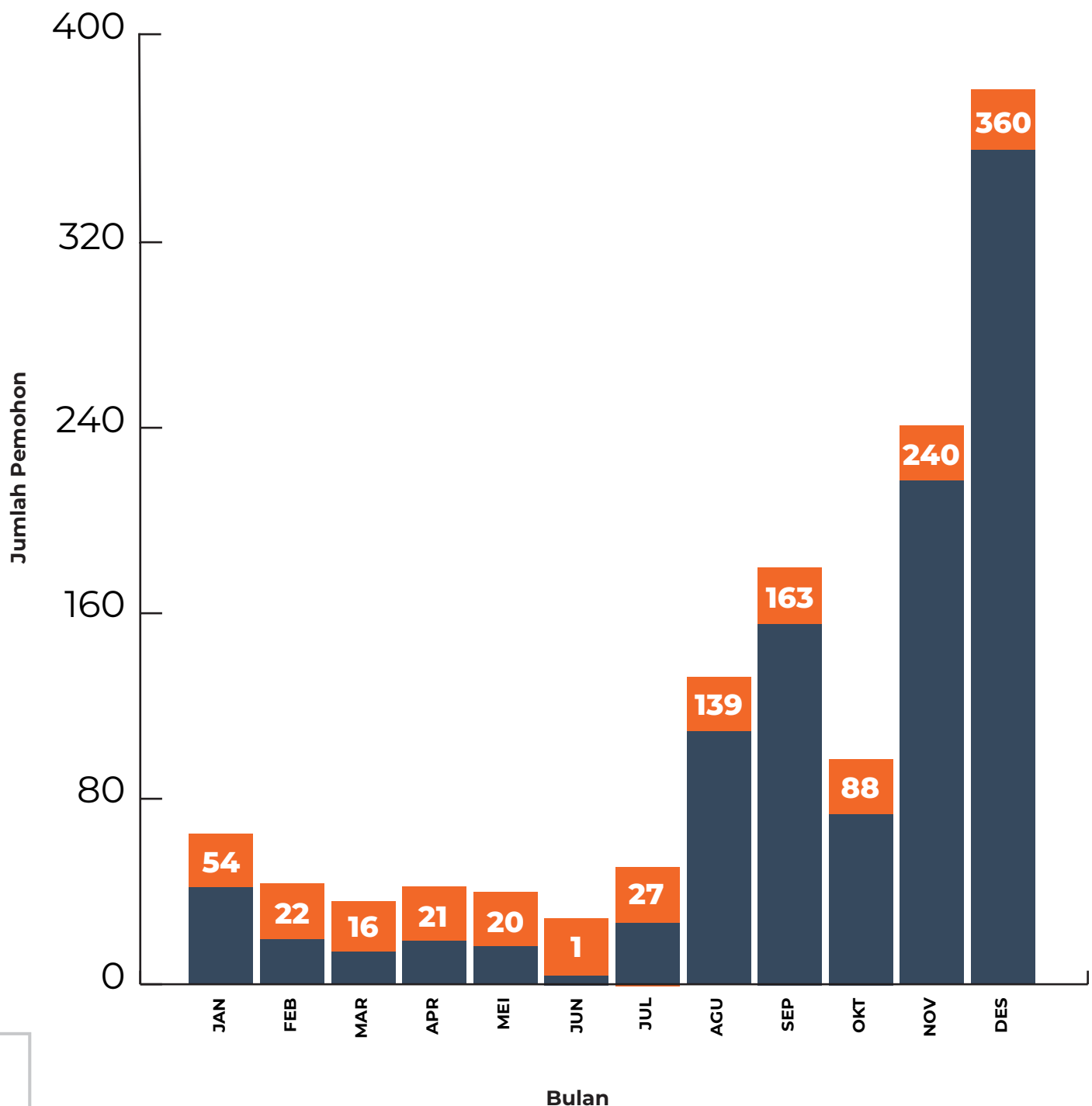
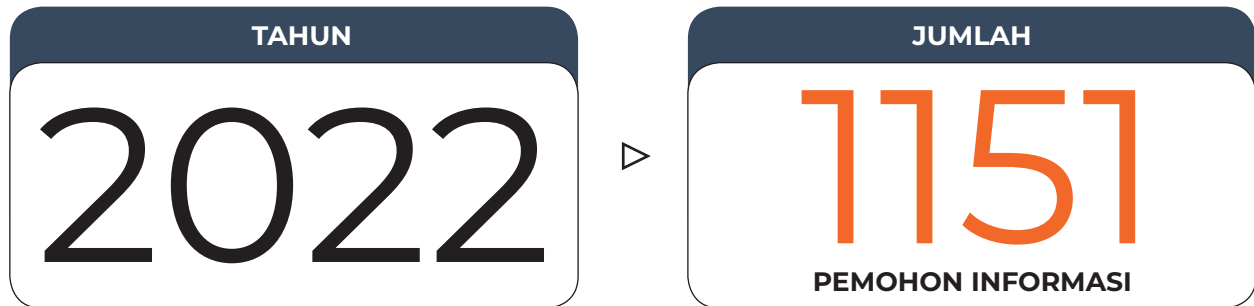
A large, stylized orange curved shape that sweeps across the upper half of the page, framing the title text.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

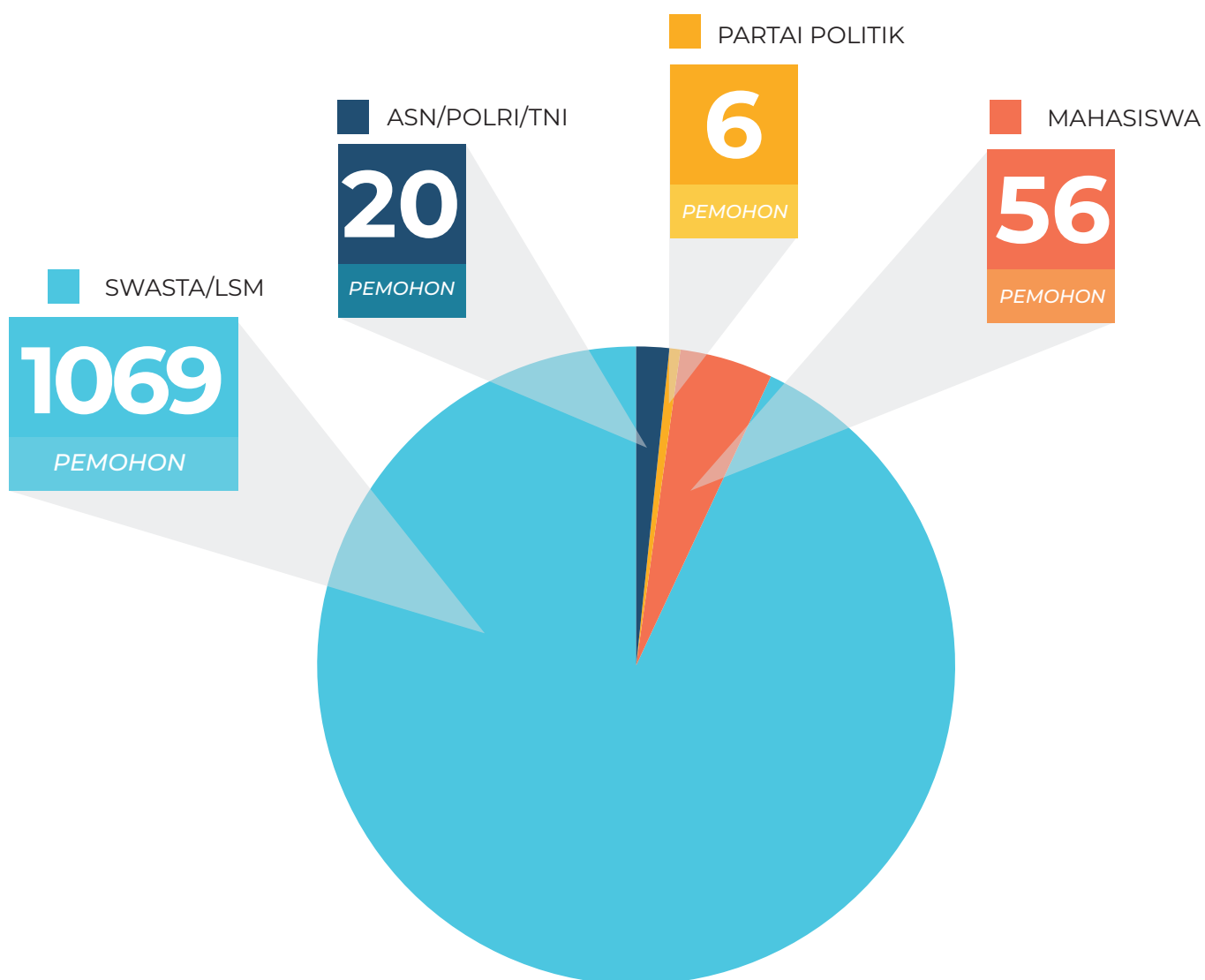
Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU RI dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:

1. desk pelayanan
2. secara *online* melalui aplikasi *ppid.kpu.go.id*.



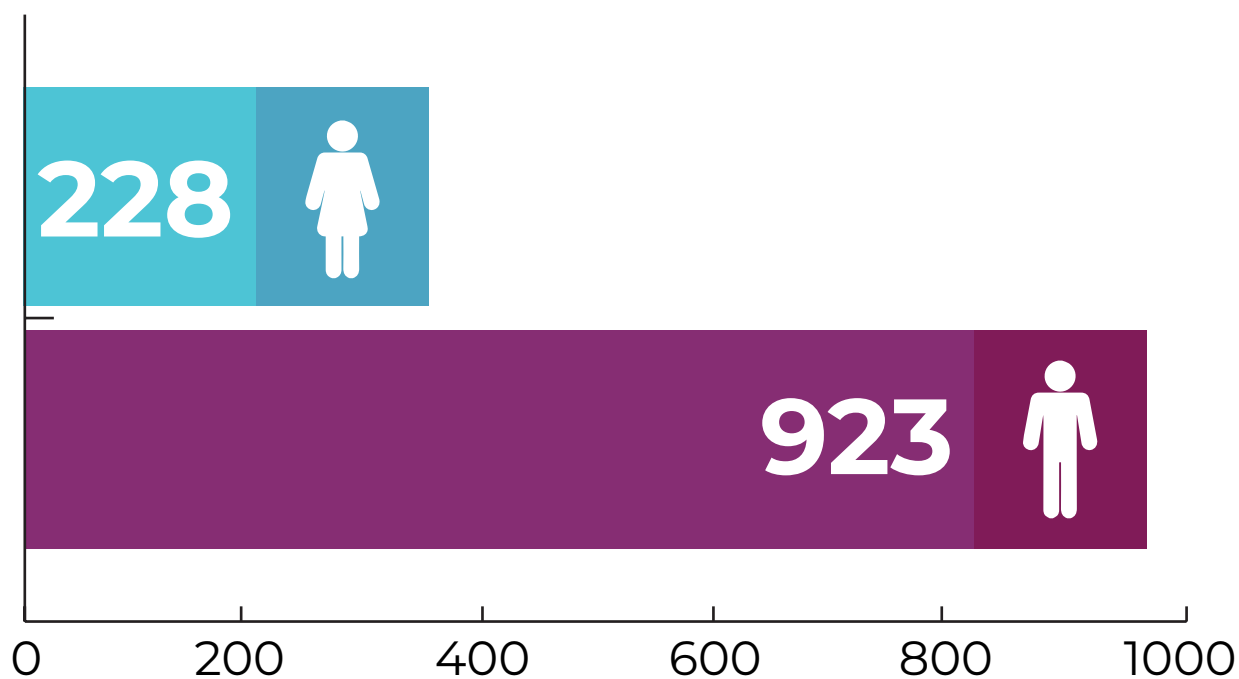
LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2022
BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN



LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2022
BERDASARKAN JENIS KELAMIN



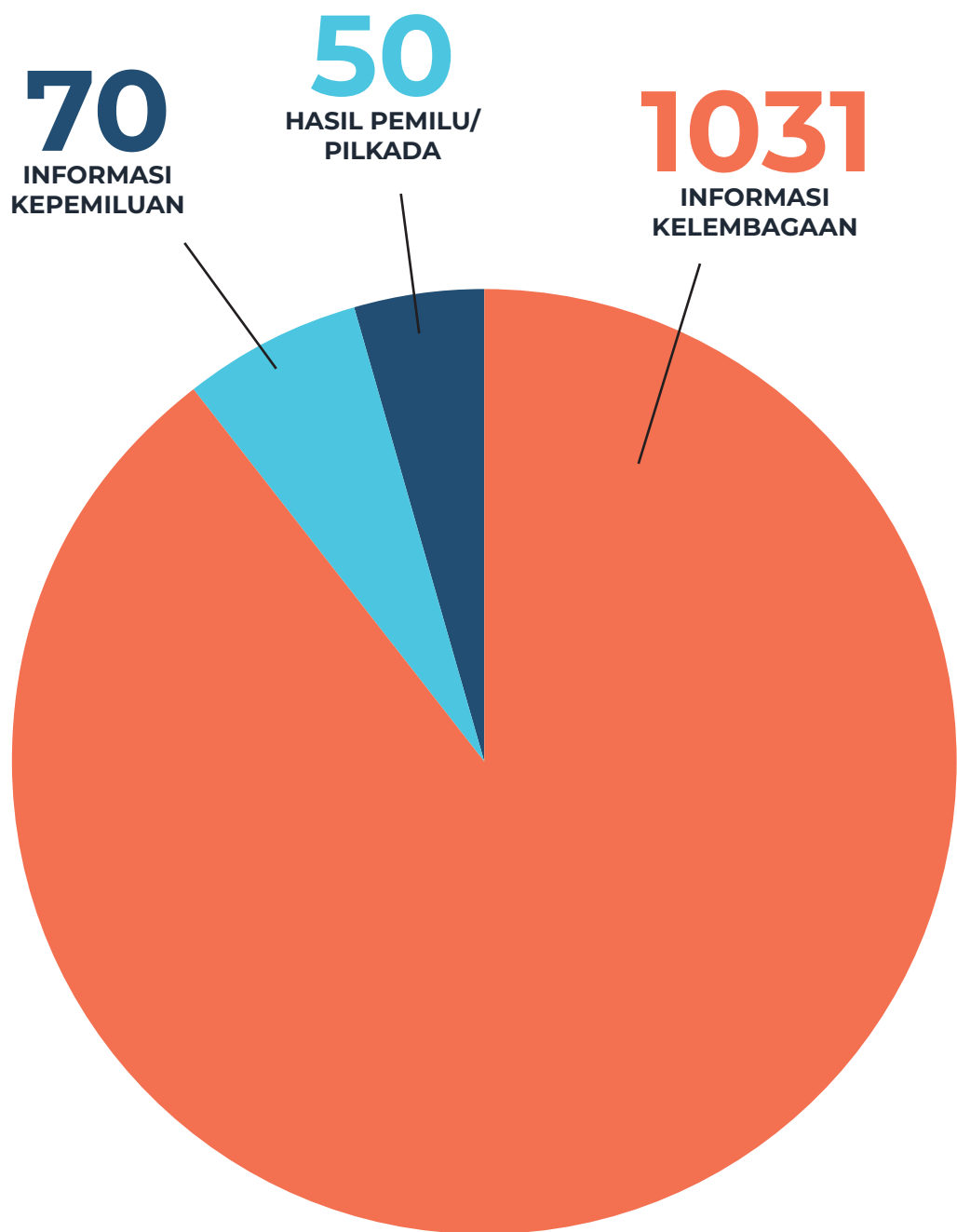
Keterangan warna:

PEREMPUAN

LAKI LAKI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2022
BERDASARKAN JENIS INFORMASI PUBLIK



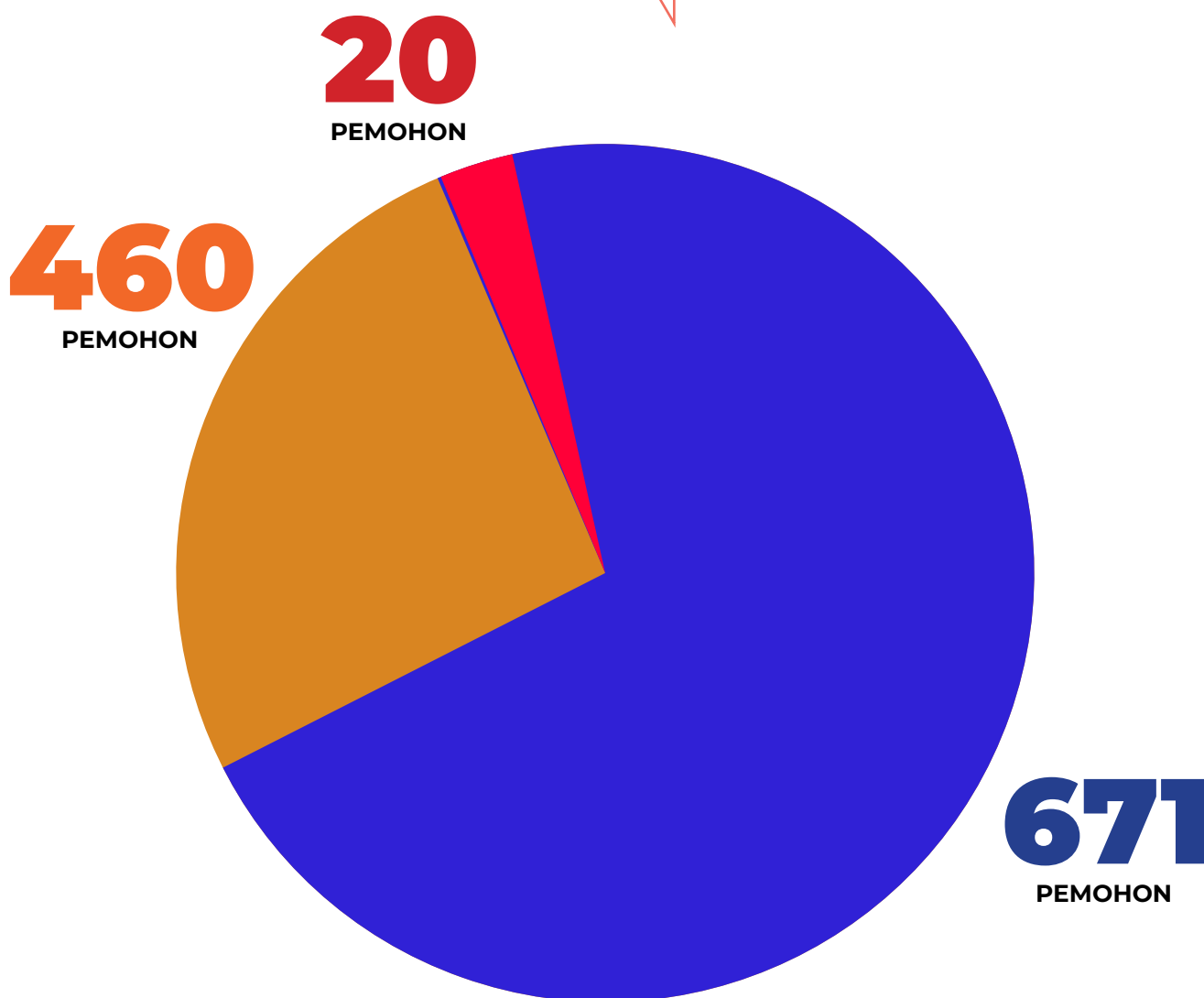
WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

WAKTU YANG DIPERLUKAN OLEH PPID KPU RI
DALAM MELAYANI PEMOHON INFORMASI:

1 HARI : 460 PEMOHON

2-7 HARI : 671 PEMOHON

>7 HARI : 20 PEMOHON



PERMOHONAN DATA

1 HARI



PERMOHONAN DATA

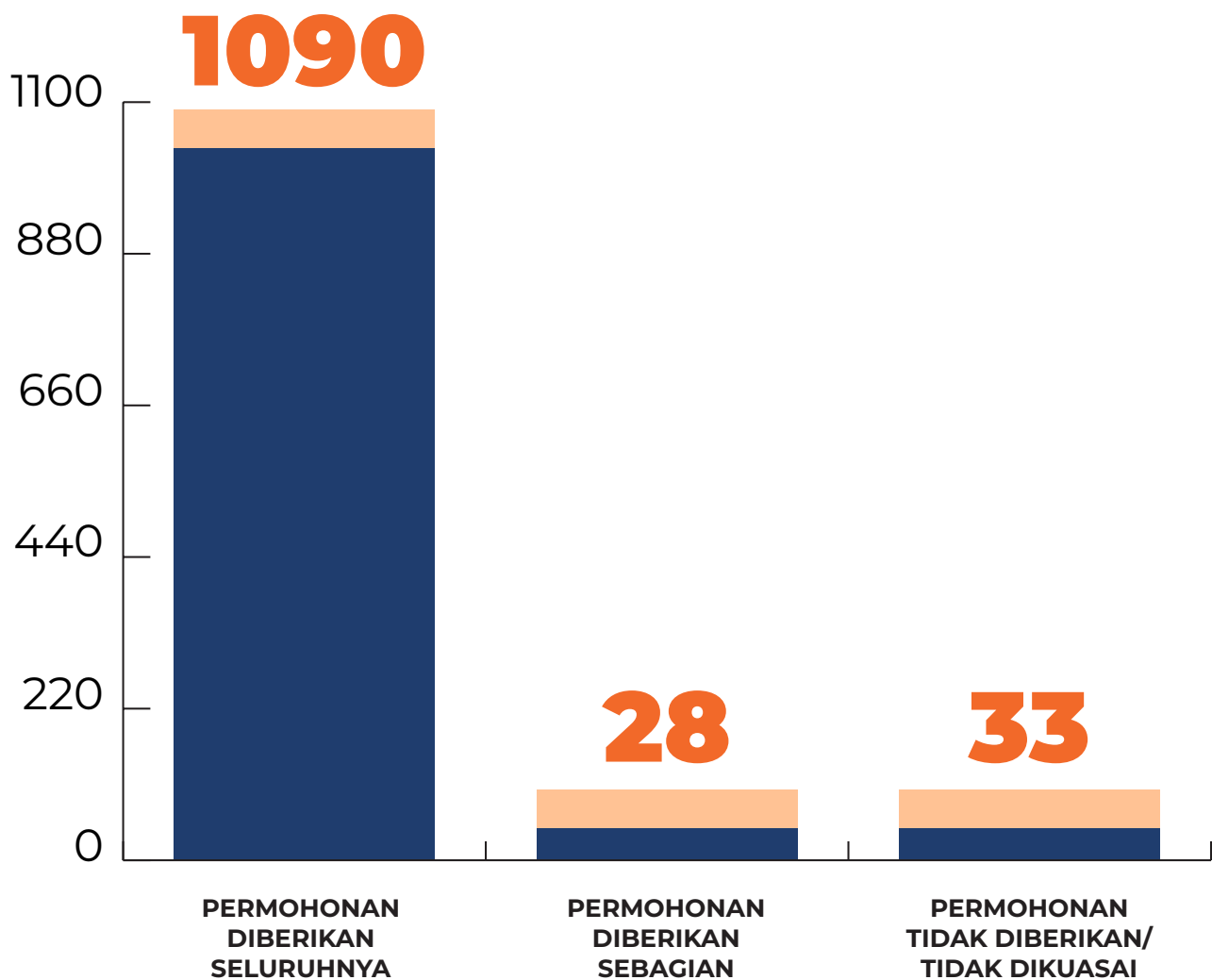
2-7 HARI



PERMOHONAN DATA

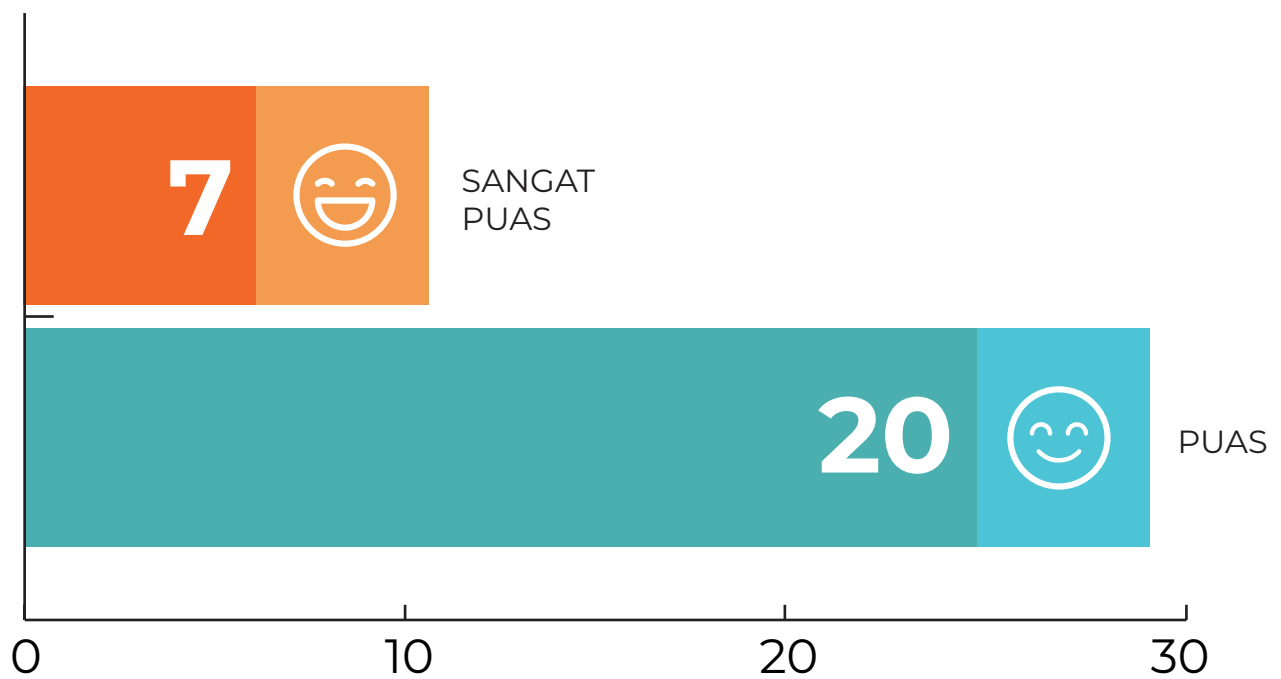
>7 HARI

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN SEBAGIAN DAN TIDAK
DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI**



PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN KEPUASAN PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2022
BERDASARKAN KEPUASAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK



A large, stylized orange curved shape that sweeps across the upper half of the page, framing the title.

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022 tidak ada sengketa Informasi Publik
dalam Pelayanan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik KPU RI

TAHUN

2022

SENGKETA

0



INOVASI DAN KOLABORASI



KPU
REPUBLIK INDONESIA

INOVASI LAYANAN INFORMASI BERKELANJUTAN



SARANA LAYANAN INFORMASI TERINTEGRASI

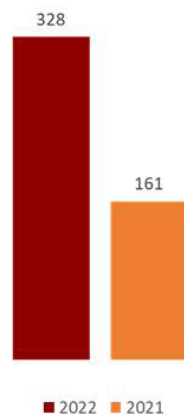
Terintegrasi

Terintegrasi Antar sarana layanan (web, android, WA, Email, Telp)

Terintegrasi antara sarana Permintaan dengan sarana *Proactive Disclosure* (Open Data, Katalog, dan DIP)

Terintegrasi secara nasional (KPU Pusat, Provinsi dan Kab/Kota)

Pemohon Informasi

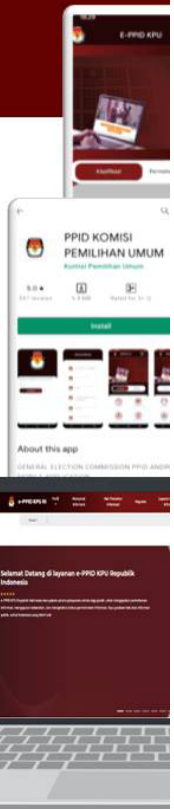


Manfaat

Memudahkan masyarakat mencari informasi karena tersedia sejumlah informasi dari ragam sarana *proactive disclosure*

Memudahkan masyarakat mengajukan permintaan informasi karena tersedia beragam sarana permintaan informasi

Memudahkan KPU melayani publik, meskipun jumlah pemohon banyak karena sarana pelayanan yang beragam

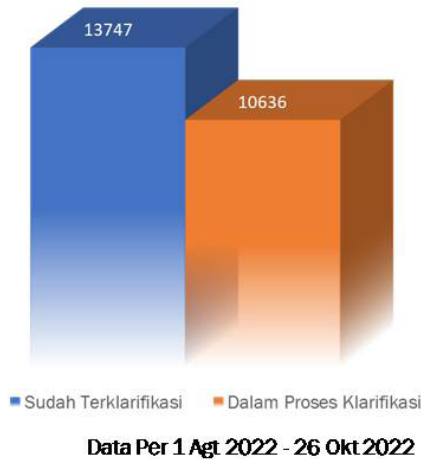


CEK KEANGGOTAAN PARTAI



Link: <https://infopemilu.kpu.go.id/>
dibentuk tahun 2022

PENGUNA
24.383



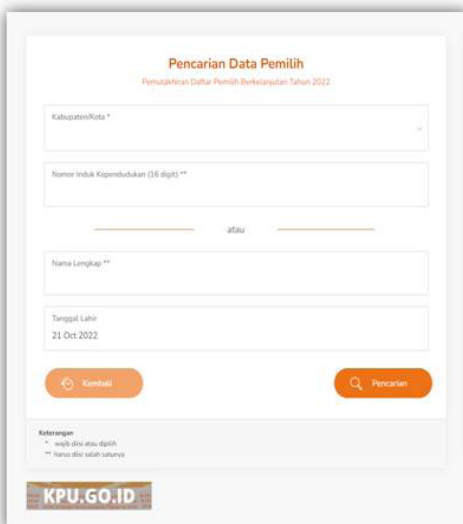
MANFAAT

Memudahkan masyarakat mendapatkan informasi

Data pribadi menjadi lebih terlindungi, karena masyarakat dapat mengajukan pemusnahan data pada partai yang melakukan pencatutan

Memudahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual keanggotaan partai

CEK DPT ONLINE



Link: <https://cekdpionline.kpu.go.id/>
dibentuk tahun 2022

PENGUNA
2.886.845



Data DPT Online 2/08/2022 – 30/10/2022

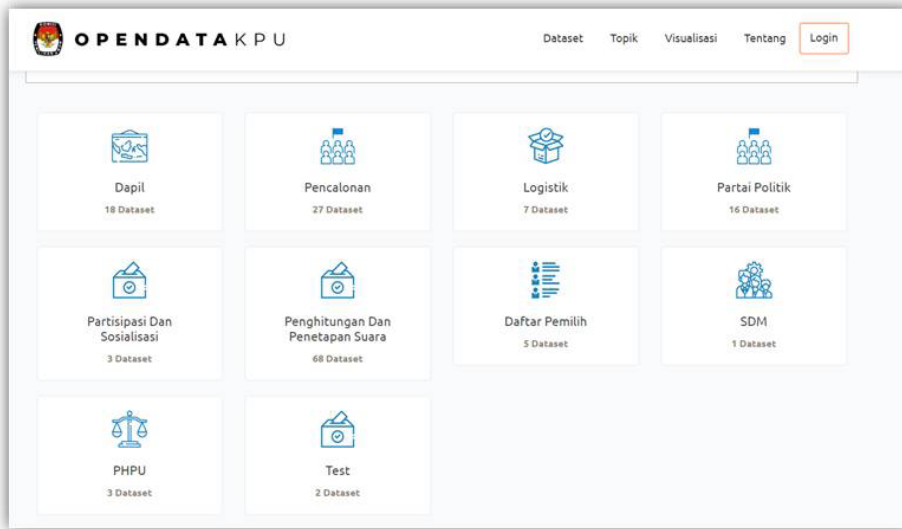
MANFAAT

Memudahkan masyarakat mendapatkan informasi

Data pribadi menjadi lebih terlindungi, karena KPU tidak perlu mengumumkan daftar pemilih secara manual sepanjang waktu

Informasi Daftar Pemilih menjadi lebih akuntabel

OPEN DATA KPU



MANFAAT

Memudahkan masyarakat mengolah data karena *machine readable*

Aplikasi ini dalam proses pengunggahan dan integrasi dengan portal satudata Bappenas RI.

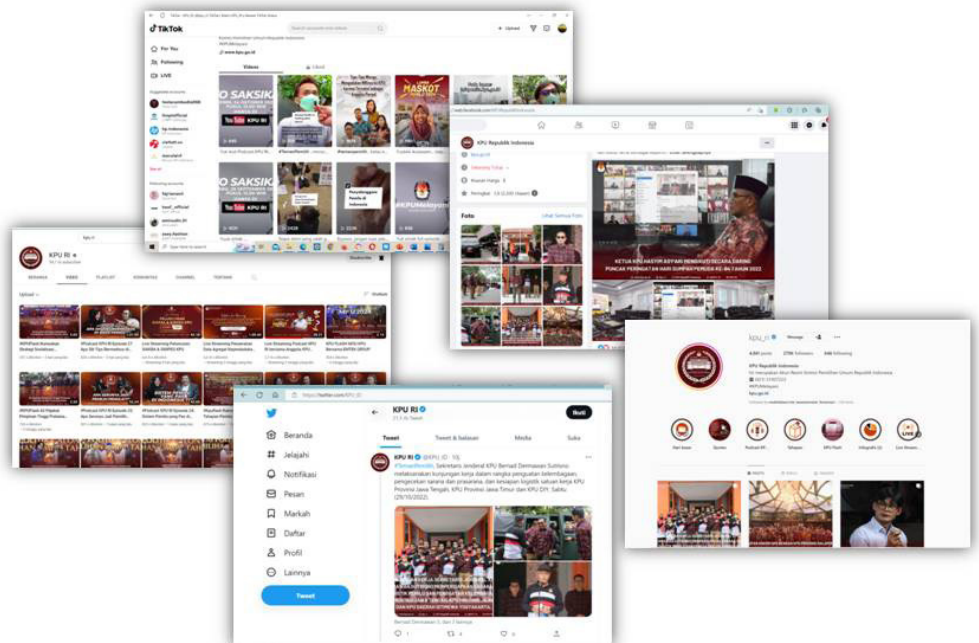
PENGUNJUNG

5.097.955

Link: <https://opendata.kpu.go.id>
dibentuk tahun 2021

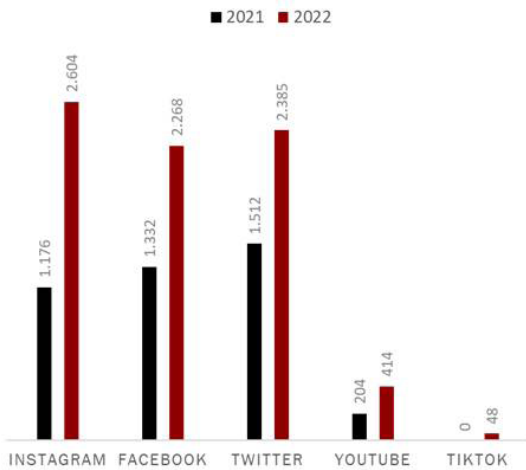
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL

Platform KPU	Tahun Pembuatan
Instagram: kpu_ri	Juli 2013
Facebook: KPU Republik Indonesia	Maret 2014
Twitter: @KPU_ID	Maret 2014
Youtube: KPU RI	Oktober 2017
TikTok: kpu_ri	April 2022

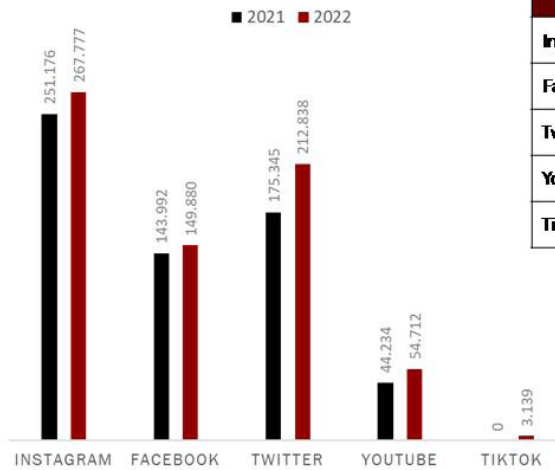


PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL

JUMLAH CONTENT



JUMLAH FOLLOWER



Platform	Kenaikan 2021-2022
Instagram	16.601
Facebook	5.888
Twitter	37.493
Youtube	10.478
TikTok	3.139

ANALISIS MEDIA SOSIAL KPU

6.047.777

Jumlah jangkauan media sosial KPU

22.833

Jumlah interaksi media sosial KPU

Sumber: Analisis Brand24.com, 29/10/2022
Data 29 Okt 2021 – 29 Okt 2022



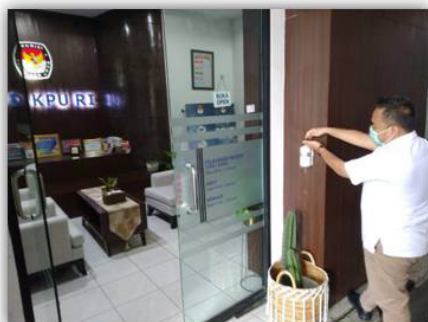


KPU
REPUBLIK INDONESIA

INOVASI LAYANAN INFORMASI DI MASA PANDEMI



LAYANAN INFORMASI DI MASA PANDEMI



Anggaran KPU mengalami refocusing
untuk Penanganan COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
2021 sebesar Rp 184.786.591.000

**NAMUN, PELAYANAN
INFORMASI KPU TETAP**

3 2A A1 2 1CA1 3A K

LAYANAN INFORMASI DI MASA PANDEMI



Layanan informasi KPU dilaksanakan secara online dan offline dengan proses ketat.

LAYANAN INFORMASI DI MASA PANDEMI

Sejak pandemi hingga kini, KPU membuka sarana pelayanan melalui WA, yang tetap direspon meskipun di luar hari dan jam kerja.

PENGGUNA LAYANAN WHATSAPP PPID KPU

357 Orang

Januari 2021 – Oktober 2022



LAYANAN INFORMASI DI MASA PANDEMI

KPU menyediakan dan mengembangkan berbagai aplikasi informasi yang memudahkan publik mendapatkan atau mengunggah informasi tanpa harus ke KPU

Kanal	Keterangan
Info Pemilu	Informasi Tahapan Pemilu, Hasil Verifikasi Partai Politik, dll
Sipol	Sarana partai untuk melakukan pendaftaran dan unggah data online
Cek NIK	Sarana publik untuk mengecek keanggotaan partai politik
Cek DPT Online	Sarana publik untuk mengecek apakah ada di daftar pemilih, dll

Jangkauan Keterbukaan KPU

Web	Pengunjung
Web	23,800,920
Info Pemilu	9,094,705
JDIH	12,926,840
e-PPID	4,987,360
Open Data	5,097,955

Aplikasi	Pengguna
Cek NIK Parpol	24.383 (Ags – Okt 2022)
Cek DPT Online	5.584 (30 Okt 2022)
Permintaan Informasi	489 (2021 – 2022)

Medsos KPU	Jumlah
Jangkauan	6.047.777
Interaksi	22.833
Mentions	11.485
Likes	19.363

statshow.com; brand24.com; KPU RI, Per 29 Okt 2021 – 29 Okt 2022

Stakeholder Keterbukaan Informasi KPU



Pemilih berbasis latar belakang tertentu*



Masyarakat umum



Media massa



Pengawas



Partai Politik Peserta Pemilu



Pemantau Pemilu



Organisasi kemasyarakatan



Masyarakat Adat



Instansi pemerintah

*Pemilih yang berbasis latar belakang tertentu: keluarga; Pemilih pemula; Pemilih muda; Pemilih perempuan; Pemilih penyandang disabilitas; Pemilih berkebutuhan khusus (masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan); kaum marginal; komunitas; keagamaan; relawan demokrasi; dan warga internet (netizen).

Diolah dari Pasal 5 PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Program-Program

Tata Kelola



Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan SDM terkait Pengelolaan Informasi

Transparansi



- Peningkatan Publikasi Informasi
- Pembentukan Aplikasi Informasi Pemilu
- Pengembangan Sarana Layanan Permintaan Informasi

Komunikasi



- Kolaborasi KPU dan publik
- Klarifikasi Disinformasi Pemilu

1. Tata Kelola



Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan SDM Terkait Pengelolaan Informasi

1. Pengembangan *roadmap* dan regulasi mengenai Kearsipan, Keterbukaan Informasi, dan Perlindungan Data Pribadi
2. Integrasi tupoksi PPID, *Data Protection Officer*, Arsip, dan Walidata
3. Peningkatan kapasitas SDM pada unit kerja terkait pengelolaan informasi

Dalam proses pelaksanaan

2. Transparansi



Peningkatan Publikasi Informasi

Publikasi informasi sesuai Perki SLIP, Perki Pemilu, dan informasi lain yang dibutuhkan publik.

Per Oktober 2022, jumlah informasi publik yang diunggah di laman kpu.go.id sebanyak 7.678 informasi.



Pengembangan Sarana Layanan Informasi

1. Membuat sarana permintaan informasi: web PPID (2021), Apps PPID, Whatsapp PPID (2020)
2. Membuat beragam kanal informasi: Open Data (2021), Katalog Informasi (2021), Sistem Informasi Kepegawaian (2022), dll



Pembentukan Aplikasi Informasi Pemilu

1. Cek NIK keanggotaan Partai Politik (2022)
2. Cek DPT Online (2022)
3. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (2022)
4. Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (2022)
5. Infopemilu.kpu.go.id
6. Jdih.kpu.go.id

Perki SLIP = Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Perki Pemilu = Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu

Telah terlaksana/terbentuk dan terus diperbaharui

3. Komunikasi



Peningkatan Kolaborasi

1. Pemanfaatan seluruh media sosial (2013 - 2022)
2. Diskusi berkala dengan masyarakat sipil (2022)
3. Membuat menu Q & A pada web KPU (2021)
4. MoU dengan media, OMS, kampus, pemerintah, dan partai.
5. Sosialisasi partisipasi pemilu di 500 titik (2022 - 2023)
6. Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di 34 Provinsi (2021)



Pelaksanaan Klarifikasi Disinformasi Pemilu

1. Press Conference (2021 sd oktober 2022: 78 kegiatan)
2. Press Release (2021 sd oktober 2022: 102 terbitan)
3. Door Stop (memberikan keterangan kepada awak media)
4. Kanal Hoax Pemilu di kpu.go.id

Telah terlaksana/terbentuk dan terus diperbaharui

Kolaborasi

Diseminasi informasi, penguatan representasi, penguatan implementasi sistem pemilu, Pendidikan pemilih, keterbukaan informasi, dan perlindungan data.

PERGURUAN TINGGI

1. Universitas Islam Indonesia
2. Universitas Teuku Umar
3. Universitas Syiah Kuala
4. Universitas Dayanu Ikhsanuddin
5. UIN Sunan Kalijaga
6. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7. Universitas Gadjah Mada
8. Institut Seni Indonesia
9. Universitas Negeri Yogyakarta
10. UPN "Veteran" Yogyakarta
11. UIN Maulana Malik Ibrahim
12. UIN Sunan Ampel
13. Universitas Halu Oleo

MEDIA

1. Kompas Grup
2. Viva Group
3. Emtek Grup (SCTV, Indosiar, Vidio.com)
4. Media Group Network (Metro TV, MI, Medcom, dll)
5. CT Corp (CNN, Detik Tran TV, dll)
6. Tribun Digital Online
7. IDN Media

ORGANISASI NON PEMERINTAH

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
2. Indonesian Parliamentary Center (IPC)
3. Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD)
4. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
5. Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

PARTAI POLITIK

Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu

LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAINNYA

1. PT Pos Indonesia (Persero)

PEMERINTAH DAN DPR

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Badan Siber dan Sandi Negara
3. Komisi II DPR RI



Klik Video

INOVASI PPID KPU RI TAHUN 2022



Klik Video

KOLABORASI PPID KPU RI TAHUN 2022



KENDALA

PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DI KPU MENGALAMI KENDALA, ANTARA LAIN :

-
- 1 Aplikasi ppid.kpu.go.id sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis;
 - 2 Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;
 - 3 Tersedia Tenaga pendukung namun mungkin kuantitasnya yang masih kurang.
 - 4 Penguasa informasi belum lengkap memberikan list informasi yang dikuasai, sehingga mempersulit dalam proses pengelompokan informasi, termasuk proses uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan
-

A large, stylized orange curved shape that sweeps from the top left towards the bottom right, creating a dynamic background for the text.

RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU. Untuk mendukung hal tersebut, KPU menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1 Pengembangan e-PPID KPU RI sebagai upaya meningkatkan kemudahan pelayanan permohonan informasi , dengan mempermudah akses permohonan informasi jelang Tahapan Pemilu 2024
- 2 Perluasan akses Pelayanan Informasi PPID KPU RI Mobile dalam basis Android dan IOS untuk semakin memudahkan Pemohon Informasi mengakses informasi ke pemilu.
- 3 Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 tentang PPID, disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2019 dan PERKI Nomor 1 Tahun 2021 serta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang SOTK KPU. Disesuaikan dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- 4 Melakukan sosialisasi Peraturan KPU tentang PPID yang telah disesuaikan (sebagaimana pon 3 di atas) kepada PPID KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- 5 Peningkatkan kualitas pengelolaan PPID KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota melalui giat pelatihan, khususnya dalam menghadapi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 6 Memperkuat proteksi system jaringan/ server KPU RI agar semakin baik dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi.
- 7 Peningkatan Inventarisir Informasi Yang Dikecualikan
- 8 Membuat program inovasi dalam pelayanan informasi kelembagaan dan ke pemilu yang semakin cepat, update dan transparan.
- 9 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan informasi.
- 10 Pelayanan informasi yang aksesibel bagi semua kalangan masyarakat



PPID

KPU REPUBLIK INDONESIA

**INFORMASI
ADALAH
HAK ANDA.**

www.ppid.kpu.go.id